

Bimbingan Teknis Penyusunan RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2026



Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan daerah maupun nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan harus menjadi perhatian utama agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang mampu menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara optimal.

Salah satu instrumen penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen RPPLH menjadi pedoman strategis dalam perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, sehingga setiap kebijakan pembangunan dapat selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. RPPLH juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, pelestarian ekosistem, hingga pengurangan risiko kerusakan lingkungan.

Penyusunan RPPLH memerlukan pemahaman yang komprehensif, keterampilan teknis, serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup menjadi salah satu langkah penting agar proses penyusunan RPPLH dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah masing-masing.

Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah, telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten pada hari Senin sampai dengan Selasa, tanggal 12 sampai dengan 13 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi, pembelajaran, serta diskusi teknis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan dokumen RPPLH di Provinsi Banten.

Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya RPPLH sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, melalui bimbingan teknis ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami tahapan penyusunan RPPLH, metodologi yang digunakan, kebutuhan data, hingga sinkronisasi kebijakan lingkungan hidup dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar pemerintah daerah di Provinsi Banten agar memiliki kesamaan persepsi dan komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat terus berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis RPPLH

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 12 hingga 13 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten, serta unsur terkait lainnya yang memiliki peran dalam proses penyusunan dokumen RPPLH.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan suasana yang aktif dan interaktif. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti setiap sesi materi maupun diskusi yang disampaikan oleh narasumber. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya dokumen RPPLH sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Acara diawali dengan arahan pengantar oleh **Dr. Hariani Samal, S.Hut., M.Si** selaku Direktur Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa RPPLH memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah.

Disampaikan pula bahwa dokumen RPPLH bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Dengan adanya RPPLH, pemerintah daerah diharapkan mampu mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup ke dalam seluruh proses perencanaan pembangunan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Menurut beliau, tantangan lingkungan hidup saat ini semakin kompleks, mulai dari pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, penurunan kualitas sumber daya alam, hingga dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan berbasis data agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, **Dr. Hariani Samal** juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penyusunan RPPLH. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memiliki kesamaan visi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat saling mendukung dan berjalan secara harmonis.

Sambutan dan Pembukaan Resmi

Setelah arahan pengantar, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten **Dr. Wawan Gunawan, S.Sos., M.Si.** Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan narasumber yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Beliau menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten memiliki komitmen kuat dalam mendorong penyusunan RPPLH Provinsi maupun RPPLH Kabupaten/Kota sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah. Menurutnya, pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam.

Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah yang memiliki pertumbuhan pembangunan cukup pesat menghadapi berbagai tantangan lingkungan hidup yang perlu dikelola secara serius. Pertumbuhan industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan jumlah penduduk, serta pemanfaatan sumber daya alam harus diimbangi dengan kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang tepat dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, beliau juga menekankan pentingnya menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup berkaitan dengan kemampuan lingkungan menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk ke dalamnya.

Apabila pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, maka akan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, dokumen RPPLH menjadi sangat penting sebagai acuan dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam secara bijaksana.

Beliau berharap kegiatan bimbingan teknis ini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis seluruh peserta dalam menyusun dokumen RPPLH yang berkualitas, aplikatif, dan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Paparan Modul Penyusunan RPPLH

Pada sesi berikutnya, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Kelompok Kerja RPPLH Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (PSDAB). Dalam sesi ini, peserta mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai modul penyusunan RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota.

Materi yang disampaikan meliputi berbagai aspek penting dalam proses penyusunan RPPLH, mulai dari dasar hukum, tahapan penyusunan, metodologi, pengumpulan data, analisis kondisi lingkungan hidup, hingga proses sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Narasumber menjelaskan bahwa penyusunan RPPLH harus dilakukan secara sistematis dan berbasis data yang valid. Data yang digunakan harus mencerminkan kondisi aktual lingkungan hidup di daerah, termasuk kondisi sumber daya alam, kualitas air, kualitas udara, penggunaan lahan, kawasan lindung, serta potensi risiko lingkungan hidup.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya keterpaduan antara RPPLH dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta kebijakan pembangunan sektoral lainnya. Sinkronisasi ini bertujuan agar kebijakan pembangunan yang disusun dapat selaras dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan mengenai pentingnya partisipasi berbagai pihak dalam penyusunan RPPLH. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyusun dokumen ini. Diperlukan keterlibatan akademisi, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya agar dokumen RPPLH yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan lingkungan hidup di daerah.

Peserta juga diberikan contoh-contoh praktik baik penyusunan RPPLH dari beberapa daerah yang telah berhasil mengintegrasikan kebijakan lingkungan hidup ke dalam pembangunan daerah. Contoh-contoh tersebut menjadi referensi penting bagi peserta dalam memahami implementasi RPPLH secara nyata.

Simulasi Penyusunan Materi Teknis RPPLH

Salah satu sesi penting dalam kegiatan bimbingan teknis ini adalah simulasi penyusunan materi teknis RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota. Melalui simulasi ini, peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik langsung dalam menyusun dokumen RPPLH.

Dalam simulasi tersebut, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan latihan penyusunan materi RPPLH berdasarkan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing. Setiap kelompok didampingi oleh narasumber dan fasilitator yang memberikan arahan teknis selama proses simulasi berlangsung.

Peserta diajak untuk mengidentifikasi isu-isu lingkungan hidup yang menjadi prioritas di daerahnya, seperti pencemaran sungai, pengelolaan sampah, alih fungsi lahan, banjir, kekeringan, hingga kerusakan kawasan pesisir. Setelah itu, peserta diminta menyusun langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Melalui simulasi ini, peserta memperoleh pengalaman langsung mengenai bagaimana proses penyusunan RPPLH dilakukan secara teknis. Mereka juga belajar mengenai pentingnya analisis data, penyusunan indikator lingkungan hidup, serta penyesuaian program pembangunan dengan kondisi lingkungan hidup daerah.

Kegiatan simulasi berlangsung dengan penuh semangat dan diskusi aktif antar peserta. Banyak peserta menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di daerah masing-masing, sekaligus berbagi pengalaman mengenai upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan.

Narasumber memberikan berbagai masukan dan solusi terhadap kendala yang disampaikan peserta. Hal ini menjadi salah satu nilai positif dari kegiatan bimbingan teknis, karena peserta tidak hanya mendapatkan materi, tetapi juga ruang untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman.

Pentingnya RPPLH dalam Pembangunan Berkelanjutan

Dokumen RPPLH memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam konteks pembangunan daerah, RPPLH menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan tetap memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Dengan adanya RPPLH, pemerintah daerah memiliki pedoman dalam menentukan arah pembangunan yang selaras dengan kondisi lingkungan hidup.

RPPLH juga membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan lingkungan hidup secara lebih terstruktur. Melalui dokumen ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di wilayahnya.

Selain itu, RPPLH berfungsi sebagai alat pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melebihi daya dukung lingkungan hidup. Dengan demikian, keberlanjutan sumber daya alam dapat tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Dalam era modern saat ini, tantangan lingkungan hidup semakin meningkat akibat perubahan iklim, urbanisasi, pertumbuhan industri, dan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya alam. Oleh sebab itu, keberadaan RPPLH menjadi semakin penting sebagai instrumen perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Harapan dan Komitmen Bersama

Melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat semakin memahami pentingnya penyusunan dokumen RPPLH yang berkualitas dan implementatif. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Komitmen ini harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata, perencanaan yang matang, serta implementasi program yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Kerja sama lintas sektor juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyusunan dan implementasi RPPLH. Seluruh pemangku kepentingan perlu terlibat aktif agar kebijakan lingkungan hidup dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penutup

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 13 Mei 2026 menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai penyusunan RPPLH, tetapi juga memberikan pengalaman praktik langsung melalui simulasi penyusunan materi teknis RPPLH.

Melalui arahan, paparan materi, diskusi, serta simulasi yang dilaksanakan selama kegiatan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya RPPLH sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. RPPLH diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Dengan koordinasi dan komitmen bersama, diharapkan penyusunan RPPLH di seluruh wilayah Provinsi Banten dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan dokumen yang berkualitas.

Pada akhirnya, keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada dokumen perencanaan semata, tetapi juga pada komitmen seluruh pihak dalam melaksanakan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan. Melalui upaya bersama, diharapkan lingkungan hidup yang sehat, lestari, dan berkelanjutan dapat terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang.